



DETERMINAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI PULAU SUMATERA

Sri Ningsih¹, Rian Putra², Dwi Hastuti³, Logi Mulawarman⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Government Expenditure, Education, and Investment on Inclusive Growth in Sumatra over the 2019–2024 period. The analytical method employed is panel data regression using the Fixed Effect Model approach. The findings indicate that the three independent variables exert a significant simultaneous effect, yielding an R-Square value of 54.23%. Partially, Government Expenditure exhibits a positive and significant influence, demonstrating that public budget allocations have been effective in fostering equitable development. Conversely, Education has a negative impact, which indicates a structural mismatch between educational output and local labor market demands, thereby driving educated unemployment. The Investment variable also demonstrates a negative and significant effect, reflecting that capital inflows into Sumatra remain heavily dominated by capital-intensive sectors and are not yet optimal in absorbing local labor. Consequently, local governments in Sumatra are recommended to enhance the quality of public spending, align educational curricula with local industrial needs, and formulate strategic incentive regulations for labor-intensive investments to mitigate economic inequality.

Keywords: *Inclusive Growth, Government Expenditure, Education, Investment, Panel Data Regression.*

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

1. PENDAHULUAN

Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan strategis dalam perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kawasan ini terdiri atas sepuluh provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi di wilayah ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi. Beberapa provinsi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi karena didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan sumber daya alam yang melimpah, sementara provinsi lainnya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Wandita, at all 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, keberhasilan pembangunan ekonomi sering kali diukur berdasarkan tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan, terbatasnya penciptaan lapangan kerja (*jobless growth*), rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (*voiceless growth*), serta munculnya kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan

* Sri Ningsih (✉)

Universitas Negeri Jambi

Email : sriningsih@unja.ac.id



pembangunan (*futureless growth*) (Satrio, et al 2019). Oleh karena itu, paradigma pembangunan saat ini tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep pertumbuhan inklusif hadir sebagai pendekatan yang menekankan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati secara luas dan menyeluruh oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang produktif, mengurangi kemiskinan, serta menurunkan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan output ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ningsih et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Septrila & Kurniasih (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Pulau Sumatera, penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap provinsi telah mampu memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah belum tentu diikuti oleh penurunan kemiskinan, berkurangnya ketimpangan pendapatan, maupun peningkatan kesempatan kerja. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi perlu mempertimbangkan aspek inklusivitas agar dapat menggambarkan kualitas pembangunan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini mengukur tingkat pertumbuhan inklusif pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dengan menggunakan pendekatan *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) yang dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan (Ali & Zhuang, 2007; Oluseye & Gabriel, 2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan inklusif didefinisikan oleh (Samans, 2017) sebagai pertumbuhan yang mendorong equal opportunities serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan ini. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memungkinkan semua anggota masyarakat berpartisipasi dan berkontribusi secara setara terhadap pertumbuhan ekonomi, terlepas dari keadaan individu. Sementara itu menurut (Mckinley & Mckinley, 2010) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mengarah pada pertumbuhan inklusif, yang tidak hanya meningkatkan output tetapi juga harus mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua lapisan di masyarakat, terutama tentu saja bagi masyarakat miskin.

Beberapa pendapat ahli berfokus pada produktivitas pekerjaan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan inklusif. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas pekerjaan perlu untuk strategi pertumbuhan berkelanjutan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan karena masyarakat miskin lebih banyak mengandalkan tenaga kerja sebagai aset terpenting



mereka. Dari kedua pengertian ini menunjukkan kepada proses pada pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif akan terjadi ketika semua segmen masyarakat berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi, artinya jumlah pengangguran yang sedikit. Disamping itu tenaga kerja ini juga harus terus meningkatkan produktivitas mereka. Dengan meningkatnya produktivitas maka perekonomian akan terpacu selain itu pendapatan masyarakat pun akan bertambah (Demertzis et al., 2019).

2.2 Determinan Pertumbuhan Inklusif

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Wijayanti & Raihansyah, 2024). Dalam hal pertumbuhan inklusif, peran pemerintah sangat diperlukan, hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah memiliki kewajiban menyusun suatu strategi kebijakan yang mampu mengarahkan sebuah perekonomian menuju pertumbuhan yang inklusif. Salah satu peranan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mengalokasikan anggaran secara efektif. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan membuktikan bahwa peran pemerintah yang dilihat melalui belanja pemerintah (Syam & Aimon, 2025) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan angka kemiskinan, mampu mengurangi ketimpangan pada pendapatan, serta mampu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

2.2.2 Pendidikan

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan dikembangkan oleh Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas individu. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja serta menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan (Raheem et al., 2018). Menurut teori ini, pengeluaran untuk pendidikan bukan merupakan konsumsi semata, melainkan investasi yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang terjadi. Peningkatan tingkat pendidikan akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi (Syam & Aimon, 2025).

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu indikator penting yang sering digunakan dalam penelitian mengenai pertumbuhan inklusif karena memiliki hubungan erat dengan



penurunan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan pendapatan (Ningsih et al., 2025).

2.2.3 Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sukirno, 2016)

Sementara investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2010). Hal ini mengartikan bahwa investasi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Sehingga kegiatan investasi yang dilakukan dimasa sekarang sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung dimasa depan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, investasi berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta pengembangan infrastruktur. Investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata apabila manfaatnya dapat dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, investasi sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperluas aktivitas ekonomi di berbagai sektor (Nehemia et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pertumbuhan Inklusif Model PEGR

3.1.1 Indeks pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan;

Indeks Pertumbuhan inklusif terhadap pengurangan angka kemiskinan dibentuk menggunakan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk miskin. Pendapatan perkapita digunakan sebagai proksi untuk menghitung pendapatan, dengan asumsi :

pengeluaran = pendapatan.

$$IGp = (EpgEp)Gg \dots\dots\dots (3.1)$$

a) Dimana :

IGp : koefisien pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan;

Ep : elastisitas kemiskinan terhadap pengeluaran rata-rata;

Epg : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi;

Gg : pertumbuhan ekonomi;

IGp menyatakan inklusivitas pertumbuhan terhadap kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IGp > Gg$.



3.1.2 Indeks pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan

Indeks pertumbuhan inklusif terhadap pengurangan ketimpangan dibentuk menggunakan indeks gini dan rata rata pengeluaran penduduk dengan asumsi semua pengeluaran digunakan untuk konsumsi (makanan dan non makanan), (Amalina & dkk, 2013)

$$IGin=(EingEin)Gg \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

IGin : koefisien pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan;

Ein : elastisitas ketimpangan terhadap rata rata pengeluaran penduduk

Eing : elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi;

Gg : pertumbuhan ekonomi ;

IGin menyatakan inklusivitas pertumbuhan terhadap ketimpangan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IGin > Gg$.

3.1.3 Indeks pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran

Indeks pertumbuhan inklusif terhadap pengurangan angka pengangguran dibentuk menggunakan jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja.

$$IGem=(Eemg/Eem)Gg \dots\dots\dots (3.3)$$

a) Dimana :

IGem : koefisien pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran;

Eem : elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah angkatan kerja;

Eemg : elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi;

Gg : pertumbuhan ekonomi ;

IGem menyatakan inklusivitas pertumbuhan terhadap pengangguran, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IGem > Gg$.

3.1.4 Pertumbuhan Inklusif (IG);

Pertumbuhan Inklusif adalah berupa nilai indeks atau koefisien pertumbuhan inklusif yang diperoleh dari hasil penghitungan model Inklusif PEGR. Dari ketiga indeks tersebut akan dibentuk menjadi indeks komposit yaitu indeks pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Indeks tersebut terbentuk dari ketiga indeks yang sudah dibentuk sebelumnya.

$$IG = IGp + IGin + IGem \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

IG : Indeks pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran;

IGp : Indeks pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan;

IGin : Indeks pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan;

IGem : Indeks pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran

Nilai PEGR dapat dikelompokan sebagai berikut :

Jika $IG = Gg$ maka artinya pertumbuhan bersifat netral, setiap orang menerima manfaat yang sama secara proporsional dari pertumbuhan.

Jika $IG > Gg$ berarti pertumbuhan bersifat pro poor growth, penduduk miskin lebih banyak menerima manfaat dari pertumbuhan.

Jika $0 < IG < Gg$ berarti pertumbuhan bersifat not pro poor growth, manfaat pertumbuhan lebih banyak diterima penduduk tidak miskin (ketidakmerataan meningkat) tetapi masih terjadi pengurangan kemiskinan.

Jika $IG < 0$ berarti pertumbuhan bersifat anti poor atau manfaat pertumbuhan yang dinikmati penduduk tidak miskin, kemiskinan meningkat.



3.2 Regresi data Panel

Penelitian dilakukan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada rentang waktu pengambilan tahun 2019 sampai 2024 dengan menggunakan data tahunan. Data dalam penelitian adalah data Panel dengan crossection 10 provinsi dan time series 6 tahun. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait yaitu, Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Y = Pertumbuhan Inklusif

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi dari X1

β_2 = Koefisien Regresi dari X2

β_3 = Koefisien Regresi dari X3

X1 = Pengeluaran Pemerintah

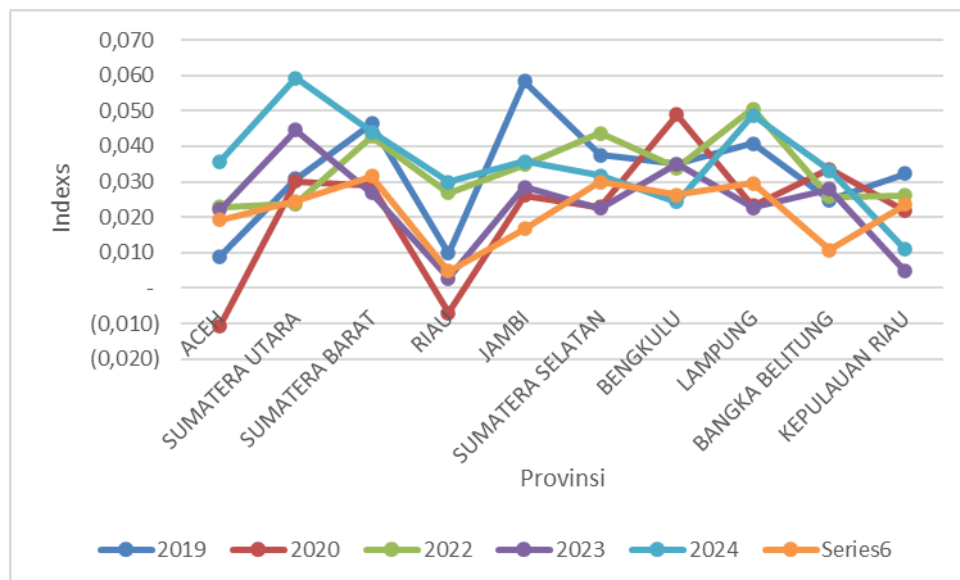
X2 = Pendidikan

X3 = Investasi

ε_{it} = *Term of error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pertumbuhan Inklusif di Sumatera



Gambar 1. Indeks Pertumbuhan Inklusif pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan kriteria pengelompokan indeks PEGR, hasil evaluasi terhadap tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 10 provinsi di Sumatera selama periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi baik secara temporal maupun spasial. Secara temporal, guncangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membagi wilayah Sumatera ke dalam dua kondisi ekstrem, di mana Provinsi Aceh dan Riau masuk dalam kategori *Anti-Poor Growth* ($IG < 0$) karena pertumbuhan ekonomi sepenuhnya kontraktif bagi kelompok rentan dan meningkatkan



kemiskinan, sedangkan delapan provinsi lainnya berada dalam kategori *Not Pro-Poor Growth* ($0 < IG < Gg$) di mana kemiskinan masih berkurang namun lajunya sangat lambat dan ketimpangan meningkat. Sementara itu, secara spasial berdasarkan nilai rata-rata akhir periode, seluruh 10 provinsi di Sumatera secara umum dikelompokkan ke dalam kategori *Not Pro-Poor Growth* ($0 < IG < Gg$). Meskipun berada di kategori yang sama, terdapat disparitas kemampuan wilayah dalam menekan ketimpangan; Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Lampung menunjukkan performa terbaik dengan tren menuju inklusif karena laju penurunan kemiskinannya relatif lebih efektif, sedangkan Provinsi Riau dan Aceh berada pada tingkat inklusivitas terendah yang mengonfirmasi bahwa kue pertumbuhan dari sektor padat modal kaya sumber daya alam di kedua daerah tersebut masih mengalami sumbatan dan belum terdistribusi secara merata ke masyarakat lapisan bawah.

4.2 Hasil Analisis Model Panel Regresi

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, ditentukan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik dan paling tepat untuk mengestimasi data amatan. Keputusan ini diambil melalui dua tahapan pengujian formal, di mana tahap pertama melalui Uji Chow menghasilkan nilai p-value sebesar 0,0002 ($< 0,05$) yang berarti Fixed Effect Model (FEM) lebih unggul dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, pengujian diperkuat melalui Uji Hausman untuk membandingkan antara FEM dan Random Effect Model (REM), yang menghasilkan nilai p-value sebesar 0,0341 ($< 0,05$). Hasil tersebut menolak hipotesis nol sehingga disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model linier terbaik yang mampu mengakomodasi adanya karakteristik unik serta heterogenitas spesifik yang melekat pada masing-masing entitas objek amatan selama periode tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 1. Analisis Regresi data Panel

| Variabel Dependen | Variabel Independen | Coefisien | t-s Statistik | Prob. |
|----------------------|------------------------|-----------|---------------|--------|
| Pertumbuhan Inklusif | Pengeluaran Pemerintah | 0.2104636 | 6.398998 | 0.0230 |
| | Pendidikan | -0.021145 | -1.702535 | 0.0800 |
| | Investasi | -0.027871 | -3.360801 | 0.0120 |
| | R Square | 0.5423101 | | |
| | Prob F Statistic | 0.000023 | | |

Sumber : olahan penulis

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas dapat dijelaskan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,2104636 dengan nilai Prob. sebesar 0,0230. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Inklusif. Setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Pertumbuhan Inklusif sebesar 0,2104636 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah telah efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian (Syam & Aimon, 2025)

Pendidikan: Variabel Pendidikan menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -0,021145 dengan nilai Prob. sebesar 0,0800 pada tingkat alfa 10%. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Inklusif. Setiap kenaikan indeks atau capaian pendidikan



sebesar 1 satuan justru diikuti oleh penurunan Pertumbuhan Inklusif sebesar 0,021145 satuan. Dampak negatif yang signifikan ini mengindikasikan adanya mismatch (ketidaksesuaian) antara output dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, atau tingginya angka pengangguran terdidik yang menyebabkan output pendidikan belum mampu didistribusikan secara merata ke dalam sistem ekonomi inklusif sejalan dengan penelitian (Satrio et al., 2019).

Investasi: Variabel Investasi memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,027871 dengan nilai Prob. sebesar 0,0120. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Inklusif. Setiap peningkatan investasi sebesar 1 satuan justru menurunkan nilai Pertumbuhan Inklusif sebesar 0,027871 satuan. Dampak negatif ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa investasi yang masuk belum bersifat padat karya atau masih berpusat pada sektor-sektor padat modal, sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal atau memperkecil ketimpangan ekonomi di Sumatera, hasil ini diperkuat oleh temuan penelitian (Ningsih et al., 2025)

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Terdapat 4 hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, pertama berdasarkan hasil perhitungan indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera ditemukan bahwa secara rata-rata tingkat pertumbuhan inklusif masih berada pada tingkat *Not Pro Poor Growth* yang artinya kemiskinan berkurang, ketimpangan menurun namun hasil dari pertumbuhan ekonomi benefitnya masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat non miskin sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang terjadi di Sumatera belumlah pertumbuhan yang inklusif.

Kedua, variabel Pengeluaran pemerintah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di 10 provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja publik di wilayah Sumatera telah berjalan cukup efektif dan mampu menstimulus pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan.

Ketiga, Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Inklusif. Temuan ini mengindikasikan adanya fenomena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja riil di Sumatera, yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran terdidik.

Terakhir Investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Inklusif. Dampak negatif ini mengonfirmasi bahwa arus investasi yang masuk ke wilayah Sumatera masih didominasi oleh sektor padat modal (*capital intensive*) bukan padat karya (*labor intensive*), sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal untuk menekan ketimpangan.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang lebih baik di Sumatera, beberapa kebijakan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah terkait adalah:

Yang pertama, Optimalisasi Kualitas Belanja Publik. Pemerintah daerah di Sumatera perlu menjaga dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, terutama di sektor-sektor yang langsung mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah pinggiran.



Kedua, Reformasi dan Sinkronisasi Dunia Pendidikan. Dinas Pendidikan dan lembaga penyedia kerja perlu mengambil langkah nyata untuk menyelaraskan kurikulum, khususnya pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, dengan karakteristik industri lokal di Sumatera. Strategi ini penting untuk menurunkan angka pengangguran terdidik agar sumber daya manusia bisa memberi kontribusi positif pada ekonomi inklusif.

Ketiga, Redesain Strategi Insentif Investasi. Pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi atau skema insentif yang khusus untuk menarik investasi yang banyak menyerap tenaga kerja. Investor yang berkomitmen untuk mempekerjakan sejumlah besar tenaga kerja lokal atau melakukan transfer teknologi kepada masyarakat setempat harus diberikan kemudahan dalam proses birokrasi. Ini penting agar dampak investasi tidak hanya dirasakan oleh pemilik modal, tetapi juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil temuan. Pertama, cakupan variabel independen dalam model ini terbatas pada tiga variabel makro: Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, dan Investasi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 54,23% menunjukkan bahwa sekitar 45,77% variasi Pertumbuhan Inklusif di Sumatera dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti tingkat kemiskinan, inflasi, dan ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Kedua, indikator yang digunakan masih bersifat makro dan agregat. Misalnya, variabel Pendidikan hanya mengukur jumlah keterlibatan fisik di sekolah tanpa mampu merepresentasikan kualitas kompetensi lulusan secara akurat. Sementara itu, variabel Investasi tidak memisahkan antara porsi padat modal dan padat karya secara spesifik. Terakhir, penelitian ini menggunakan rentang waktu pengamatan yang relatif pendek, yaitu antara 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menangkap perubahan struktural ekonomi jangka panjang secara lebih menyeluruh, termasuk fluktuasi ekonomi makro di wilayah Sumatera pada tahun-tahun setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*. 97.
- Demertzis, M., Sapir, A., Wolff, G., Demertzis, M., & Tagliapietra, S. (2019). *Promoting sustainable and inclusive growth and convergence in the European Union*. April.
- Mckinley, T., & Mckinley, T. (2010). *ADB Sustainable Development Working Paper Series Inclusive Growth Criteria and Indicators : An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress Inclusive Growth Criteria and Indicators : An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress*. 14.
- Nehemia, S. D., Prasetya, F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2023). *Jdess* 02.01.2023. 2(1), 26–37.
- Ningsih, S., Alfisyahri, N., Irawan Deki, & Putra, R. (2025). *Analisis Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif terhadap Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Menggunakan Pendekatan Panel Simultan*. 10(204).
- Oluseye, I. C., & Gabriel, A. A. (2017). *Determinants of Inclusive Growth in Nigeria : An ARDL Approach*. 7(3), 97–109. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20170703.01>
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth , human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48.



<https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>

- Samans, R. (2017). *The Inclusive Growth and Development Report*. January.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education. https://archive.org/details/microeconomics0015samu/page/n3/mode/2up?utm_source=chatgpt.com
- Satrio, M. K., Amar, S., & Aimon, H. (2019). *Determinants of Inclusive Growth on the Inequality*. 97(Piceeba), 138–148.
- Seprila, N., & Kurniasih, E. P. (2022). The Effect of Inflation and Economic Growth on Unemployment Rate in Asean Countries. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 580–594. <https://doi.org/10.52218/ijbtob.v2i6.226>
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (edisi keti). Rajawali Pers.
- Syam, B., & Aimon, H. (2025). *Analysis of the Determinants of Inclusive Economic Growth and Poverty Gap in Indonesia*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-839-4>
- Wandita, D. T., Lampung, U., & Fithriani, R. (1875). *PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP*. 33(1), 90–97.
- Wijayanti, D., & Raihansyah, M. (2024). *Dampak Kemiskinan , PDRB , Pengangguran , dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebuah Studi Empiris di Provinsi Riau Tahun 2018-2023*. 21(2), 595–602.

